

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru yang mengajarkan bagaimana manusia dapat berpikir secara obyektif yang akan memberinya kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan zaman atau tidak (Soekanto, 1999: 363).

Tak bisa dipungkiri pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan seseorang yang pada awalnya tidak mengetahui apa-apa menjadi mengetahui segala hal. Dari yang tidak bisa menulis dan membaca menjadi terampil menulis dan membaca. Dari seseorang yang tidak berkemampuan apapun menjadi seseorang yang pandai dan berkemampuan IPTEK. Dalam Islam hal ini tercantum dalam surat Al-Alaq, *“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.”* Dengan demikian jelaslah manusia memiliki kewajiban dalam mencari ilmu terutama dengan memperoleh pendidikan yang layak.

Di Indonesia kita mengenal ada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan nonformal, formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara

mandiri. Ketiga jenis pendidikan itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, berkemampuan IPTEK tinggi, dan berakhlak mulia.

Pendidikan yang baik tidak hanya membentuk seseorang menjadi cerdas semata. Kecerdasan yang tinggi tanpa disertai akhlak yang mulia akan menjadi sia-sia belaka. Di sinilah peran guru sebagai pendidik diperlukan, sebab guru tidak hanya berperan sebagai pengajar dalam artian “transfer ilmu”. Guru harus mampu mendidik anak didiknya agar berakhlak mulia serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia yang berlimpah kekayaan alam tidak bisa menikmati, karena hampir seluruh kekayaan alamnya diangkut ke negeri Belanda sebagai negara penjajah. Keadaan ini membuat kecemasan kaum importir Belanda yang membawa barang hasil industri dari Eropa ke Indonesia, karena mereka tidak dapat menjual barang dagangannya karena daya beli masyarakat yang rendah, sedangkan industri di negeri Belanda sedang pesat. Semakin banyaknya kemunculan kaum liberalis di Belanda, yang salah seorang tokohnya adalah Van Deventer, yang memunculkan gagasan perlunya Belanda memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan pendidikan Bangsa Indonesia. Pemikiran Van Deventer itu terkuak dalam tulisan yang kemudian dikenal sebagai “hutang kehormatan” yang ditulis dalam sebuah artikel dalam majalah *De Gids* yang terbit pada tahun 1899. Dalam sumber yang sama dijelaskan bahwa, Van Deventer berusaha meyakinkan masyarakat Belanda bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan negara. Peristiwa dapat dipandang sebagai ekspresi ide yang baru kemudian dikenal dengan “Politik Etika”.

Van Deventer menganjurkan program itu untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki irigasi agar meningkatkan produksi pertanian, menganjurkan transmigrasi dan perbaikan dalam lapangan pendidikan. Sejak dilaksanakannya politik etika tampak sekali kemajuan dalam pendidikan dengan diperbanyaknya sekolah rendah, sekolah yang berorientasi barat untuk orang Cina dan Indonesia yang didirikan. Demikian juga pendidikan dikembangkan secara vertikal dengan didirikannya MULO dan AMS yang terbuka bagi anak Indonesia untuk melanjutkan ke tingkat Universitas. Selama periode ini akhirnya sistem pendidikan mencapai kelengkapannya. Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi kaum bumi putera, maka pada tahun 1907 diambil dua tindakan penting, yaitu memberi corak dan sifat ke Belanda-Belandaan pada kelas I (*Hollands Inlandse School*) dan mendirikan sekolah kelas II (*vervolg*).

Konsekuensi Politik Etis ini, pada gilirannya sangat mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan pribumi khususnya pendidikan bercorak Islam (Islam). Sistem pendidikan Islam mulai terancam karena sistem pendidikan yang dijalankan oleh Belanda terbuka luas bagi rakyat, dan disadari pula bahwa, melalui pendidikan, Belanda melakukan proses “pemerataan” rakyat pribumi yang pada gilirannya akan melapangkan jalan bagi politik kolonial sendiri.

Kebijaksanaan pendidikan Belanda di Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan Islam (tradisional) dianggap sebagai kekuatan laten yang dapat mengancam kekuatan pemerintah. Oleh karena itu harus ada usaha untuk melemahkan potensi Islam melalui kebijakan pendidikan ini. Pada tahun 1905 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan “*Goeroe Ordonantie*”, yakni undang-undang yang mewajibkan para pendidik di sekolah-sekolah diluar kontrol pemerintah, memperoleh izin dari instansi yang ditentukan (Saidi, 1984: 126).

Situasi sosial dan politik di Hindia-Belanda pada awal abad ke dua puluh, telah berimplikasi terhadap pendidikan Islam. Belanda memiliki persepsi bahwa pendidikan Islam dan politik adalah sesuatu yang sukar untuk dipisahkan. Tidak heran bila sistem pendidikan Islam sering dijadikan bulan-bulanan dan harus berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan jajahan yang tidak menguntungkan. Keadaan inilah yang telah memicu meningkatnya kesadaran rakyat pribumi, terutama kalangan ulama, untuk semakin memberikan prioritas dalam bidang pendidikan. Para ulama mendirikan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang sekaligus bergerak dalam lapangan pendidikan dan bahkan politik.

Pendidikan Islam kurang mendapat perhatian dari pemerintah Belanda walaupun pada dasarnya tidak membedakan pendidikan, namun pada kenyataannya pendidikan Islam tidak mendapat perhatian. Dalam banyak hal langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Belanda untuk mengawasi gerakan pembaharuan itu umumnya diarahkan kepada gerakan nasional dan tidak terbatas pada gerakan-gerakan pembaharuan Islam saja.

Banyak dikalangan Islam yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan, bukan hanya dari kalangan Kristen saja tetapi juga dari pihak nasionalis yang netral agama. Meskipun sudah diberlakukannya Politik Etis namun pendidikan Islam di Indonesia kurang mendapat perhatian dari pemerintah Belanda. Walaupun Islam di Indonesia banyak tertutup oleh lapisan kepercayaan lain seperti kepercayaan animisme dan Hindu, orang-orang Islam di negeri ini pada waktu itu menganggap agama mereka sebagai alat pengikat yang kuat yang membedakan mereka dari orang-orang yang bukan Islam yang mereka anggap sebagai “orang

asing”. Karena itu sebagian orang-orang Islam merasa asing terhadap Belanda hal itu membuktikan bahwa adanya jarak antara orang Belanda dengan orang Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah Belanda memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan pengajaran orang Islam. Cara ini diharapkan Belanda akan menumbuhkan perhatian orang Indonesia untuk menerima kebudayaan Belanda, yaitu kebudayaan barat, dan menumbuhkan pula pengertian yang lebih baik diantara mereka terhadap orang Belanda (Noer, 1982: 181-183).

Dalam dua dasawarsa pertama setelah tahun 1900, pendidikan di Hindia-Belanda (Indonesia) pada umumnya dan Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan pada khususnya mengalami banyak kemajuan pesat. Pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beraneka ragam coraknya. Secara umum penduduk menurut keturunan dan lapisan sosial yang ada dan menurut golongan waktu itu. Dengan demikian pada tahun 1900 atau setelah adanya Politik Etis terlihat adanya perkembangan pendidikan di Jawa Barat, hal tersebut dibuktikan dengan didirikannya sekolah-sekolah di daerah Jawa Barat, termasuk di Bandung.

Pendidikan masyarakat Bandung pada umumnya sama seperti halnya dengan pendidikan di daerah lainnya di Indonesia. Pendidikan barat pada awalnya diperuntukan hanya bagi golongan bangsawan saja, terutama berlaku bagi para putera Bupati dan elit Sunda lainnya dengan sistem pendidikan formal yang bersifat barat pada mulanya dikhususkan untuk para putera bupati dan pejabat-pejabat orang Indonesia dalam bentuk kursus di rumah-rumah pejabat tersebut (pemerintahan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung 1981:39). Pendidikan tersebut dilaksanakan dilingkungan keluarga secara individual dan dilakukan oleh anggota keluarga lain terutama yang meliputi materi menulis, membaca dan berhitung. Sedangkan untuk pendidikan agama disampaikan oleh kyai/ajengan yang sengaja didatangkan oleh keluarga (Wiriaatmadja, 2002:58).

Seiring dengan didirikannya sekolah-sekolah dan diberlakukannya pendidikan di Bandung. Muncul juga sekolah-sekolah yang bercorakan Islam, seperti Langgar, Madrasah dan Pesantren yang didalamnya mempelajari lebih banyak mengenai agama Islam lebih dalam. Dalam pesantren ini para santri mendapatkan pengajaran pengetahuan tentang Islam seperti, Usuluddin (pokok-pokok ajaran keagamaan), Usul Fiqh, fiqh, Ilmu Arobiah (untuk mendalami agama dan bahasa) dan mata pelajaran lain. Adanya sekolah-sekolah tersebut tidak terlepas dari peran serta tokoh-tokoh Islam yang membangun dan mendirikan sekaligus sebagai guru yang ingin mengajarkan bukan hanya pendidikan dasar saja tetapi pendidikan Islam secara tepat. Sebagai seorang muslim pendidikan tentang Islam

harus dipelajari sedini mungkin supaya mengerti mengenai kewajiban sebagai seorang Muslim.

Pendidikan Islam di Bandung berkembang dikarenakan banyaknya tokoh-tokoh Islam yang mendirikan sekolah Islam seperti Pesantren dan Madrasah, Pesantren- Pesantren dan Madrasah ini mereka kelola dan dikembangkan sehingga dapat menarik banyak perhatian masyarakat awam hingga kaum intelektual. Pesantren telah banyak berperan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia terutama terletak di pundak para ulama. Paling tidak ada dua cara yang dilakukan. Pertama, membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalig ke daerah-daerah yang lebih luas. Kedua, melalui karya-karya yang tersebar dan dapat di baca di berbagai tempat jauh, yang mencerminkan pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan (Yatim, 2003:301).

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Bandung pada saat itu adalah Persis. Pada tanggal 12 September 1923, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1342 H, kelompok tadarus ini secara resmi mendirikan organisasi yang diberi nama “Persatuan Islam” (Persis). Nama persis ini diberikan dengan maksud untuk mengarahkan *ruhul ijthad* dan *jihad*, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Falsafah ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam Al Quran Surat 103 : “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali (undang-undang (aturan) Allah seluruhnya dan janganlah kamu bercerai berai”. Serta sebuah hadits Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, “Kekuatan Allah itu bersama al-jama’ah”.

Pada dasarnya, perhatian Persis ditujukan terutama pada faham Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan berbagai macam aktifitas diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, mendirikan sekolah-sekolah (pesantren), menerbitkan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktifitas keagamaan lainnya. Tujuan utamanya adalah terlaksananya syariat Islam secara kaffah (keseluruhan) dalam segala aspek kehidupan. Untuk mencapai tujuan jam’iyyah, Persis melaksanakan berbagai kegiatan antara lain pendidikan yang dimulai dengan mendirikan Pesantren Persis pada tanggal 4 Maret 1936.

Di Bandung tentu tidak hanya Persis yang menyelenggarakan pendidikan Islam. Untuk itulah penelitian ini penelitian ini untuk melengkapi perkembangan pendidikan Islam di Bandung secara lebih.

Menelusuri sejarah pendidikan terutama pendidikan Islam di Indonesia sejatinya sulit karena minimnya keterangan, bukti dan referensi yang mendukung. Kalangan akademisi,

perpustakaan tidak banyak memberikan rekomendasi yang kita butuhkan utamanya periode penjajahan. Data, manuskrip, prasasti dan benda peninggalan sejarah kejayaan Nusantara banyak diangkut ke luar negeri, hingga tiap penelusuran sejarah di Indonesia mengalami kendala, karena itulah peneliti merasa tertantang untuk meneliti. Sejauh yang penulis ketahui belum ada tulisan yang secara khusus menjelaskan pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1901-1942, selain itu sebagai generasi muda dan mahasiswa pendidikan sejarah ingin menambah khasanah tentang sejarah pendidikan Islam.

Berdasarkan hal di atas, penulis merasa tertarik untuk mencoba mengkaji sejauh mana perkembangan pendidikan Islam di Bandung. Adapun kurun waktu 1901-1942 merupakan periode sejak pemberlakuan politik etis sampai dengan berakhirnya kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk skripsi dengan” Perkembangan Pendidikan Islam di Bandung 1901-1942”.

## **1.2 Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut di atas, peneliti membatasi masalah melalui rumusan dan batasan masalah berikut ini dalam beberapa pertanyaan, antara lain :

1. Bagaimana perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia sekitar akhir abad 19 ?
2. Bagaimana perkembangan Pendidikan Islam di Bandung antara tahun 1901-1942?
3. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1901-1942?
4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perkembangan pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1901-1942

## **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

Sesuai dengan pokok pemikiran di atas, terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu merupakan Jawaban dari masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya, antara lain:

1. Mendeskripsikan gambaran umum awal perkembangan Pendidikan Islam di Bandung pada akhir abad 19.
2. Menjelaskan perkembangan Pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1901-1942.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1901-1942.
4. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1901-1942.

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

1. Memperkaya penulisan sejarah terutama mengenai sejarah pendidikan Islam
2. Untuk menambah informasi mengenai pendidikan Islam di Indonesia

## **1.4 Metodologi dan Teknik Penelitian**

### **1.4.1 Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode historis atau metode sejarah. Sesuai dengan kepentingan dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini, menggunakan beberapa tahap dalam metode sejarah yang dilakukan antara lain:

1. Heuristik, yaitu kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan baik itu sumber primer maupun sumber sekunder, atau juga sumber lisan dan sumber tulisan sehingga dapat digunakan dalam menjawab permasalahan mengenai Perkembangan Pendidikan Islam di Bandung (1901-1942).
2. Kritik sumber, merupakan tahapan penulisan dalam menyelidiki dan menilai secara kritis apakah sumber-sumber yang berkaitan erat dengan Perkembangan Pendidikan Islam di Bandung (1901-1942). Penulis melakukan dua hal dalam masalah kritik sumber baik itu sumber tertulis ataupun sumber lisan. Pertama kritik eksternal yaitu cara pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah yang dipergunakan. Kedua adalah kritik internal, yaitu cara pengujian yang dilakukan terhadap aspek dalam yang berupa isi dari sumber tersebut, dengan demikian dapat diperoleh fakta tentang kondisi Perkembangan Pendidikan Islam di Bandung (1901-1942).
3. Interpretasi, merupakan tahap untuk menafsirkan fakta-fakta yang terkumpul dengan mengolah fakta yang telah dikritisi dengan merujuk beberapa referensi yang mendukung permasalahan yang menjadi kajian penulis yaitu “Perkembangan Pendidikan Islam di Bandung (1901-1942)”. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fakta yang diperoleh digunakan pendekatan interdisipliner, dengan menggunakan beberapa konsep sosiologi-ekonomi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, seperti mobilitas dan perubahan sosial dan hubungan sosial.
4. Historiografi, pada tahap ini sumber sejarah yang sudah terkumpul dianalisis dan ditafsirkan, untuk selanjutnya ditulis menjadi suatu rangkaian cerita yang relevan atau ilmiah dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul ” Perkembangan Pendidikan Islam di Bandung (1901-1942)”.

### **1.4.2 Teknik Penelitian**

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kepentingannya untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (studi literatur), yaitu dengan meneliti dan mempelajari sumber-sumber tertulis, baik berupa buku-buku, majalah, artikel, dan jurnal atau juga dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dari hasil dari penelitian akan disusun kedalam lima bab yang terdiri dari : BAB I Pendahuluan, dalam bab ini antara lain dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan penelitian, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini berupa buku, arsip maupun koran dan majalah, Buku-buku tersebut adalah buku yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam di Bandung.

BAB III Metodologi Dan Teknik Penelitian, bab ini dibahas langkah-langkah seperti metode dan teknik penulisan yang dipergunakan oleh penulis dalam memperoleh sumber, pola pengolahan sumber dengan melakukan kritik eksternal dan internal, interpretasi, yaitu menganalisis dan melakukan sintesis terhadap fakta-fakta yang telah didapatkan dari kegiatan sebelumnya. Historiografi merupakan hasil akhir dari penelitian dan dijadikan laporan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di UPI.

BAB IV “ Kondisi Pendidikan Islam Di Bandung (1901-1942)”, pada bab ini berupaya membahas uraian mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan seluruh pembahasan yang dilakukan oleh penulis seloama penelitian. Pembahasan tersebut di dalamnya terlebih dahulu bagaimana Bandung awal abad ke-20 yang dapat dilihat dari segi geografis, keadaan penduduknya dan wilayah Bandung. Lebih lanjut akan dibahas tentang kondisi sosial-ekonomi wilayah Bandung.pada bagian akhir dibahas mengenai perkembangan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti penjelasan-penjelasan tentang aspek-aspek yang ditanyakan dalam rumusan masalah. Bab ini juga membahas mengenai kondisi pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1901-1942.

BAB V Kesimpulan, dalam pembahasan bab ini menyajikan penafsiran secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang diperoleh tentang "Pendidikan Islam di Bandung di Tengah Penjajahan Belanda". Temuan hasil penelitian di lapangan yang telah dibahas pada bab IV dan hasil penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan penulis lalu disimpulkan dalam sebuah analisis.

